BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang yakni masyarakat adil, makmur, mandiri berdasarkan Pancasila dibutuhkan dana yang tidak sedikit, padahal penerimaan negara dari beberapa sektor seperti minyak dan gas yang dahulu menjadi andalan, sekarang tidak lagi dapat diharapkan.Salah satu solusi yang diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari rakyat, dimana salah satu sumber utamanya berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu sejak tahun 1994 telah digulirkan lagi reformasi perpajakan yang berlaku per 1 Januari 1995, yang ditandai dengan terbitnya beberapa peraturan perundang- undangan tentang perpajakan.

Maksud diterbitkannya undang-undang tersebut adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu: semakin diberlakukannya sistem *Self Assessment System* dalam membayar pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang dan harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

Tabel 1.1

Jumlah Tunggakan dan Pencairan Tunggakan Pajak
KPP Bandung Bojonagara Tahun Anggaran 2007 s/d 2011

Tahun	Tunggakan Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Total Tunggakan (Rp)	Pencairan (Rp)	Tunggakan Akhir (Rp)	% Pencairan
2007	22,427,551	13,023,547	35,451,098	12,428,404	23,022,694	35%
2008	23,022,694	12,699,121	35,721,815	6,062,345	29,659,470	17%
2009	29,659,470	12,319,838	41,979,308	18,664,200	23,315,108	44%
2010	23,315,108	25,178,279	48,493,387	14,467,661	34,025,726	30%
2011	34,025,726	93,172,210	127,197,936	32,097,460	95,100,476	25%
Rata-Rata	**26,490,110**	**31,278,599**	**57,768,709**	**16,744,014**	**41,024,695**	**30%**

Sumber : Data Sekunder (KPP Bandung Bojonagara)

Pembahasan tabel di atas, secara rinci dapat terlihat memberikan penjelasan bahwa data tunggakan awal pada tahun 2007 sebesar Rp 22.427.551,- dan penambahan tunggakan pajak sebesar Rp 13.023.547,- sehingga total tunggakan sebesar Rp 35.451.098,- pada saat 2007 pencairan hasil jurusita sebesar Rp 12.428.404,- sisa tunggakan akhir dari total tunggakan sebesar Rp 23.022.649,- maka jumlah pencairan tunggakan pajak dari jumlah Rp 35.451.098 yang tertagih hanya 35% dari jumlah total tunggakan.

Pada data tahun 2008 tunggakan awal sebesar Rp 23.022.694,- penambahan sebesar Rp 12.699.121,- jumlah total tunggakan pajak meningkat sebesar Rp 35.721.815,- pencairanya sebesar Rp 6.062.345,- maka sisa tunggakan akhir meningkat sebesar Rp 29.659.470 maka yang tertagih hanya 17% dari jumlah total tunggakan.

Pada data tahun 2009 tunggakan awal naik sebesar Rp 29.659.470,- penambahan sebesar Rp 12.319.838,- jumlah total tunggakan pajak meningkat sebesar Rp 41.979.308,- pencairan sebesar Rp 18.664.200,- maka sisa tunggakan akhir meningkat sebesar Rp 23.315.108,- maka yang tertagih meningkat menjadi 44% dari jumlah total tunggakan.

Pada data tahun 2010 tunggakan awal naik sebesar Rp 23.315.108,- penambahan sebesar Rp 25.178.279,- jumlah total tunggakan pajak meningkat sebesar Rp 48.493.387.661,- pencairan sebesar Rp 14.467.661,- maka sisa tunggakan akhir meningkat sebesar Rp 34.025.726,- maka yang tertagih hanya 30% dari jumlah total tunggakan. Pada data tahun 2010 tunggakan awal menurun dari tahun 2009 sebesar Rp 23.315.108,- penambahan meningkat dua kali lipat sebesar Rp 25.178.279,- jumlah total tunggakan pajak meningkat sebesar Rp 48.493.387.661,- pencairan hanya Rp 14.467.661,- maka sisa tunggakan akhir meningkat sebesar Rp 34.025.726,- maka yang tertagih hanya 30% dari jumlah total tunggakan jumlah ini menurun saat tahun 2009 dengan 44%.

Pada data tahun 2011 tunggakan awal naik sebesar Rp 34.025.726,- penambahan sebesar Rp 93.278.599,- jumlah total tunggakan pajak meningkat sebesar dua kali lipat sebesar Rp 128.197.936,- pencairan sebesar Rp 32.097.460,- maka sisa tunggakan akhir meningkat sebesar Rp 95.100.476,- maka yang tertagih hanya 25% jumlah ini menurun dari tahun 2009 dan 2010 dengan pencairan 44% dan 30%. Maka selama 5 tahun berjalan jumlah total tunggakan awal mencapai rata-rata sebesar Rp 26.490.110,- penambahan rata-rata sebesar Rp 31.278.599,- dan jumlah total

tunggakan pajak rata-rata sebesar Rp 57.768.709,- pencairan rata-rata sebesar Rp 16.744.014,- maka sisa tunggakan akhir rata-rata sebesar Rp 41.024.695,- maka rata-rata yang tertagih hanya 30%. Hal ini menandakan bahwa saldo tunggakan pajak sebelum pencairan, setiap periodenya dalam kondisi cukup besar dan cenderung terus meningkat disimpulkan bahwa tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak untuk selama 5 tahun (2007 s/d 2011) yang ada di KKP Bandung Bojonagara, adalah cenderung meningkat.

Fenomena di atas memberikan gambaran kepada penulis, menurut Bapak *Sarwo Giantaro* sebagai Kepala Seksi Penagihan di KPP Pratama Bandung Bojonagara pada saat di wawancarai menyatakan bahwa terdapat kendala yang menyebabkan di penagihan pajak di KPP Bandung Bojonagara yaitu tindakan penagihan belum dilaksanakan dengan baik seperti yang diharapkan, walaupun prosedur yang seharusnya dilakukan telah diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/Kmk.04/1998 mengenai jadwal Waktu Penagihan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan aktif tersebut merupakan upaya terakhir Penagihan KPP Bandung Bojonagara dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, wajib pajak pindah alamat tidak memberitahukan ke kantor pajak sehingga menyulitkan petugas untuk mengirimkan surat teguran.Wajib pajak yang tidak mematuhi (wajib pajak mempunyai kemampuan keuangan tetapi dengan sengaja tidak membayar hutang pajaknya) Wajib Pajak untuk tidak menunda melunasi utang pajaknya, selain itu disebabkan juga karena kurang berperannya

penagihan pajak, sehingga masyarakat cenderung tetap berpikir bahwa walaupun pajak dibayar penuh, masyarakat tidak menerima prestasi apapun dari pemerintah atas keluarnya uang mereka. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan para ahli yang mengemukakan alasan yang melandasi mengapa masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa, kurang mengertinya masyarakat terhadap ketentuan dan tata cara melaksanakan perpajakan, serta kurangnya pemahaman akan hak dan kewajibannya khususnya dalam hal perpajakan, berdampak pada relatif kecilnya pencairan tunggakan pajak, dan meningkatnya jumlah tunggakan yang tidak tertagih.

Mengingat pentingnya posisi Jurusita pajak dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara pada umumnya serta dalam proses penagihan pajak pada khususnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses penagihan pajak di kantor pelayanan pajak maka penulis membuat Tugas Akhir ini mengambil judul "**Tinjauan Terhadap Proses Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara**".

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tetapkan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Masih banyak prosedur tindakan penagihan pajak yang belum dilaksanakan dengan baik di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

2. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak yaitu wajib pajak pindah alamat tidak memberitahukan ke kantor pajak sehingga menyulitkan petugas untuk mengirimkan surat teguran.Wajib pajak yang tidak mematuhi (wajib pajak mempunyai kemampuan keuangan tetapi dengan sengaja tidak membayar hutang pajaknya)

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah untuk mengidentifikasikan persoalan yang diteliti secara jelas dan untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting dari perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai hasil laporan yang sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal terebut maka, rumusan masalah yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Apa saja kendala - kendala yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Bagaimana solusi cara mengatasi solusi kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, dapat diketahui bahwa di penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sebagai informasi yang diperlukan dalam penelitian untuk memahami prosedur kerja sebagai penagihan pajak, serta mencari dasar tioritis yang di dapat diperkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui kendala - kendala yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi solusi kendala - kendala yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penulisan laporan penelitian ini di harapkan membawa manfaat sebagai :

1. Meningkatkan Ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai prosedur peranan pajak aktif dalam upaya pencairan tunggakan pajak.
2. Sebagai bahan evaluasi atau perbandingan antara teori yang di dapat di perkuliahan dengan penelitian di lapangan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil Pelaporan Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi peneliti Direktorat Jendral Pajak yang di teliti untuk Fakultas Ekonomi di Universitas Komputer Indonesia dan masyarakat pada umumnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
    a. Laporan penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan, serta penulis dapat mengetahui prosedur peranan pajak aktif dalam upaya pencairan tunggakan pajak.
    b. Juga memperoleh pengalaman di dunia kerja sebagai study banding dari apa yang dapat selama perkuliahan dengan laporan penelitian ini
    c. Juga mengembangkan mental dan budaya kerja serta sebagai langkah evaluasi diri si peneliti.
    d. Dan khususnya peneliti dapat lebih memahami apa itu peranan pajak aktif dalam upaya pencairan tunggakan pajak.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

   Dengan adanya penelitian Laporan Penelitian ini diharapkan mendapat bahan masukan dalam melaksanakan prosedur konsultan pajak. Sesuai dengan judul yang saya ambil dalam Laporan Tugas Akhir ini.

3. Universitas Komputer Indonesia

   Program Studi Akuntansi yang sesuai dengan perpajakan sebagai bahan evaluasi untuk kurikulum yang ada pada Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, materi yang di berikan kepada Mahasiswa/i sudah memenuhi syarat dalam kebutuhan dunia kerja.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Jl. Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami Bandung, Telp 022-2004380, Fax 2009450.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dimulai pada bulan April 2012 s/d Juli 2012 berikut ini adalah aktivitas Laporan Tugas Akhir dan akitvitas Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

Tabel 1.2

Waktu Pelaksanaan Kegitan Penelitian

N0	Kegiatan	Bulan				
		Maret	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**
1	**Tahap Persiapan :**					
	1. Membuat outline dan proposal tugas akhir					
	2. Mengambil formulir penyusunan tugas akhir					
	3. Menentukan tempat penelitian					
2	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan outline dan proposal tugas akhir					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Peneliti di perusahaan					
	4. Penyusanan tugas akhir					
3	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan draf tugas akhir					
	2. Sidang tugas akhir					
	3. Penyempurnaan laporan tugas akhir					
	4. Pengadaan Tugas Akhir					